

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jum'at, 9 Agustus 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (Halaman 1)	Jum'at, 9 Agustus 2019	Harga Tanah Naik, Lokasi Belum Pasti	Kota Palangkaraya dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah serta Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur boleh terpisah jauh. Namun, hari-hari ini fenomena di sana sama: harga tanah meroket, dipicu isu pindah ibukota.
2	Kompas (Halaman 1)	Jum'at, 9 Agustus 2019	Ganjil Genap Program Separuh Hati	Kebijakan ganjil genap dinilai belum menjawab masalah polusi udara Jakarta.
3	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Jum'at, 9 Agustus 2019	Program Rumah Komunitas Jadi Solusi	Melalui Program Sejuta Rumah (PSR), Kementerian PUPR sudah berhasil menyusutkan defisit hunian. Guna mendongkrak pasokan perumahan, kementerian tersebut bakal fokus pada perumahan berbasis komunitas.
4	Bisnis Indonesia (Halaman 9)	Jum'at, 9 Agustus 2019	Pantura Perlu Dibentuk Kawasan Industri Baru	Bank Indonesia mengusulkan dibentuknya sejumlah kawasan industri baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
5	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jum'at, 9 Agustus 2019	Kontrak Diteken Akhir Tahun	Pemerintah menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama dengan badan usaha pelaksana pemenang lelang proyek preservasi jalan nasional di lintas Sumatra pada Desember 2019. Proyek ini merupakan yang pertama ditawarkan kepada badan usaha dengan skema kerja sama.
6	Bisnis Indonesia (Halaman 3)	Jum'at, 9 Agustus 2019	Berita Foto	Penyelenggara jalan tol secara bertahap berkewajiban meningkatkan layanan infrastruktur dan di lokasi tersebut telah diwujudkan dengan membangun penambahan simpang susun Balaraja serta pelebaran jalur kendaraan sepanjang 12,5 km dari Balaraja Barat sampai Cikande untuk kemudian dituntaskan hingga ke Cilegon.
7	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jum'at, 9 Agustus 2019	3 Bendungan Siap Diisi	Sejumlah proyek bendungan sudah memasuki tahap penyelesaian akhir. Dalam waktu dekat ini, tiga bendungan akan masuk proses pengisian awal atau impounding.
8	Kompas (Halaman Jendela A)	Jum'at, 9 Agustus 2019	Geliat Labuan Bajo Menarik Investasi (1)	Presiden Joko Widodo mencanangkan Labuan Bajo jadi ikon pariwisata dunia dengan mempromosikannya sebagai destinasi premium.
9	Kompas (Halaman 17)	Jum'at, 9 Agustus 2019	Sanitasi Penunjang Wisata Belum Diperhatikan	Pembangunan sanitasi penunjang pariwisata belum menjadi perhatian kepala daerah. Padahal, sanitasi berperan penting dalam promosi kawasan wisata sekaligus menjamin kesehatan wisatawan dan masyarakat.
10	Koran Tempo (Halaman 6)	Jum'at, 9 Agustus 2019	Transaksi Tol Tanpa Berhenti Diterapkan Mulai 2020	Kepala BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit, mengatakan skema single lane free flow alias transaksi tanpa berhenti diterapkan secara penuh di gerbang tol pada 2020.

Judul	<b>Harga Tanah Naik, Lokasi Belum Pasti</b>	Tanggal	Jum'at, 9 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 1)		
Resume	Kota Palangkaraya dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah serta Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur boleh terpisah jauh. Namun, hari-hari ini fenomena di sana sama: harga tanah meroket, dipicu isu pindah ibukota.		

## PEMINDAHAN IBU KOTA

# Harga Tanah Naik, Lokasi Belum Pasti

*Kota Palangkaraya dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah serta Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur boleh terpisah jauh. Namun, hari-hari ini fenomena di sana sama: harga tanah meroket, dipicu isu pindah ibu kota.*

**Reynaldo Triwibowo/Sucipto**

**L**utfi Bachtiar baru saja menjual lahan 2 hektar di Kilometer 47 dekat Desa Tumbang Talaken, Kabupaten Gunung Mas. Tanah itu dijual Rp 400 juta.

"Yang beli orang Jakarta, tetapi yang menawar dari Surabaya sampai Bali ada. Ya, gara-gara ibu kota mau pindah," kata Lutfi, Kamis (8/8/2019). Pembeli mengatakan bermaksud investasi karena yakin ibu kota negara pindah ke Kalteng.

Keyakinan berawal saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Desa Tumbang Talaken,

Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Mei 2019.

Di wilayah Tumbang Talaken, Presiden meninjau lokasi hutan yang kemungkinan menjadi lokasi ibu kota baru. Menurut Camat Manuhing Sugianto, awalnya satu kapling tanah ukuran 20 meter x 30 meter dipatok Rp 10 juta jika jauh dari permukiman. Seiring santernya isu pemindahan ibu kota, harga tanah naik menjadi Rp 40 juta per kapling.

"Saya sudah mengimbau masyarakat jangan main jual beli tanah. Ini, kan, belum pasti di mana lokasi ibu kota nanti," kata Sugianto. Lokasi Manuhing sekitar 140 kilometer dari Kota Palangkaraya.

Jalan menuju ke sana sebagian besar masih rusak. Di kiri-kanan jalan terdapat perkebunan sawit. Jenis tanahnya bukan gambut.

"Euforia" transaksi lahan juga merebak di Palangkaraya. Lahan-lahan telantar mulai dibersihkan dan ditandai. "Sudah lima tahun tak digarap. Dulu ada nanas ditanam," kata Marhat (39), warga Kota Palangkaraya. Ia baru saja mendapat sertifikat atas tanah di Jalan Mahir-Mahar yang langganannya terbakar itu.

Marhat baru saja membuat

**(Bersambung ke him 11 kol 1-2)**

# Harga Tanah Naik

**(Sambungan dari halaman 1)**

patok di lahan 300 meter persegi itu. "Harganya naik. Makanya, saya urus sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Nasional)," katanya. Lahan berukuran 10 meter x 30 meter itu ditawarkan Rp 80 juta. Tanah berukuran sama di lokasi itu tahun 2017 laku dijual Rp 40 juta.

Pembersihan lahan juga dilakukan Nikolas Itak (45), warga Hiu Putih 20. Ia mengupah dua orang untuk membersihkan lahan dengan menyiram cairan kimia pembasmi gulma agar rumput kering dan mudah dibersihkan. "Selama ini tidak sempat saya garap. Dulu ada sawit, tetapi mau diganti tanaman lain. Mending saya jual," ucapnya.

Di Palangkaraya, pendaftaran tanah meningkat. Periode Januari-Juli 2018 mencapai 340 bidang tanah, sementara periode yang sama tahun 2019 menjadi 375 bidang tanah.

"Peningkatan itu terasa. Bukan hanya karena pemindahan ibu kota, melainkan juga karena program sertifikat gratis," kata Kepala Subbidang Penetapan Hak Tanah BPN Palangkaraya Sony Gusti Anasta.

Terkait spekulasi harga tanah, Kepala BPN Provinsi Kalteng Pelopor mengungkapkan, isu pemindahan ibu kota juga berdampak pada konflik lahan. Ia enggan berkomentar banyak. Namun, ia menegaskan, banyak mafia tanah bermunculan sejak isu pemindahan ibu kota ramai.

Kalteng merupakan salah satu provinsi calon ibu kota negara. Lahan seluas 300.033 ha disiapkan di "segitiga emas" yang meliputi Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran pun optimistis ibu kota dipindahkan ke Kalteng. "Kami sudah menyiapkan dan saat ini daerah-daerah mulai berbenah menyelesaikan berbagai masalah," katanya.

**Bukit Soeharto diincar**

Di Kalimantan Timur, lahan

kawasan sekitar Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu calon ibu kota negara, juga mulai diincar investor.

Bahkan, ada yang menanyakan harga tanah di lahan konservasi. Mereka mengaku pengusaha dari Jakarta. "Kata-nya ingin buat perkantoran. Tahura itu wilayah konservasi dan milik negara sehingga tidak bisa," kata Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Tahura Bukit Soeharto, Rusmadi.

Presiden Jokowi mengunjungi kawasan itu pada Mei 2019. Sejak itu, gejala jual beli lahan muncul.

Menyusuri Jalan Soekarno-Hatta dari Km 38 hingga Km 50, Rabu (7/8), setidaknya ada tiga plang menawarkan tanah dijual. Padahal, kawasan itu masuk Tahura Bukit Soeharto. Lahan itu berada di jalan utama Balikpapan-Samarinda dan dikunjungi Presiden, Mei lalu.

Saat dihubungi, penjual bernama Kus itu berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia hendak menjual tanah 1 ha seharga Rp 1,5 juta per meter persegi. Plang dipasang sejak Juli 2019. "Februari tahun depan mungkin saya jual Rp 5 juta per meter persegi. Surat sedang kami urus. Ini tak masuk kawasan tahura," kata Kus. Saat dicek ke kelurahan, lahan itu masuk kawasan konservasi.

Enam bulan lalu, perusahaan tambang membeli tanah warga luar tahura Rp 600 juta per ha. "Lokasinya di Samboja dan harga itu cukup tinggi," kata Sekretaris Lurah Bukit Merdeka Antonius K Pakalla.

Di tengah harapan untung besar dari tanah, ada pula yang khawatir. "Silakan, saya senang-senang saja asalkan tak merugikan kami," ujar Badrun (80). Suaranya bergetar.

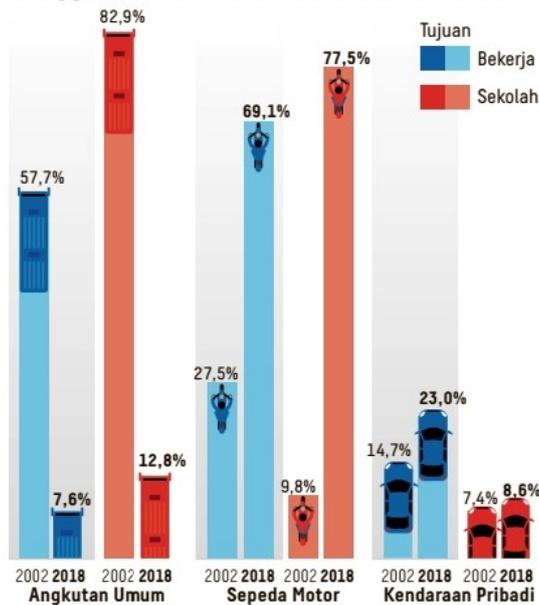
Warga asal Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, itu mengolah lahan karet 15 ha, di antaranya ditanami karet produktif. Menetap di Samboja sejak 1969, ia tak memiliki surat-surat atas tanah yang dikelolanya.

Judul	<b>Ganjil Genap Program Separuh Hati</b>	Tanggal	Jum'at, 9 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 1)		
Resume	Kebijakan ganjil genap dinilai belum menjawab masalah polusi udara Jakarta.		

## TATA KOTA

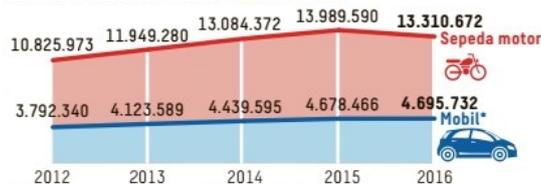
# Ganjil Genap Program Separuh Hati

### Penggunaan Kendaraan di Jabodetabek



Angkutan umum: bus, bus Transjakarta, kereta komuter, ojek, taksi, bajaj

### Kendaraan Bermotor di Jakarta



\*Mobil penumpang, mobil beban, mobil bus, dan kendaraan khusus  
Sumber: Statistik Transportasi DKI Jakarta 2017, BPS, paparan Jabodetabek Urban Transportation Master Plan Phase 2 (2019). Diolah oleh Litbang Kompas/DEW/PUT/XNA



**JAKARTA, KOMPAS** — Kebijakan ganjil genap dinilai belum menjawab masalah polusi udara Jakarta.

Peneliti Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, mengatakan, aturan ganjil genap belum diberlakukan di seluruh DKI Jakarta, tidak berlaku sepanjang hari, dan tidak dikenakan kepada sepeda motor. Akibatnya, masih besar peluang orang menggunakan kendaraan bermotor pribadi, baik dengan menggeser waktu berangkat ke waktu-waktu di luar pemberlakuan kebijakan, menggunakan mobil lain dengan pelat nomor berbeda, maupun menggunakan sepeda motor pengganti mobil.

"Jadi belum bisa dipastikan volume kendaraan tidak berkurang sehingga emisi juga belum bisa dipastikan turun," kata Deddy di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Menurut Deddy, idealnya, untuk memastikan pengurangan emisi, kebijakan diberlakukan sepanjang hari dan di seluruh Jakarta. Selain itu, aturan juga diberlakukan untuk sepeda motor. Sebagian mobil sudah menggunakan mesin standar bahan bakar minyak Euro 4 ke atas. Adapun semua sepeda motor

(Sambung ke hlm 11 kol 6-7)

BACA JUGA **HLM 21**

## Ganjil Genap Program

(Sambungan dari halaman 1)

belum memenuhi standar itu.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, seluruh aspek perluasan kebijakan ganjil genap sudah disimulasikan. Untuk sepeda motor, akan dikenakan kanalisasi, yaitu wajib menggunakan lajur paling kiri. Pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian. "Otomatis ditilang kalau melanggar marka," ujarnya.

Kanalisasi dimaksudkan agar kecepatan sepeda motor konstan dan sepeda motor tak melaju secara zig-zag. Prioritas pertama kanalisasi akan diterapkan di area pemberlakuan ganjil genap dan dilakukan secara bertahap.

Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar M Nasir menjelaskan, personel yang diutamakan untuk menjaga kawasan ganjil genap adalah personel satuan wilayah, yaitu polres dan polsek. Polda akan menempatkan personelnnya ketika polres dan polsek meminta penambahan personel terkait perluasan ganjil genap. Jumlah personel tambahan disesuaikan dengan permintaan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Driver Online (ADO) Wiwit Sudarsono mengatakan, DPD ADO DKI Jakarta menolak keras perluasan ganjil genap. ADO menolak Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 terkait pengendalian polusi udara DKI Jakarta dengan cara memperluas ganjil genap.

Seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018, pengecualian aturan ganjil genap ini hanya untuk kendaraan transportasi umum berpelat kuning. Sementara transportasi daring menggunakan pelat hitam sehingga terkena aturan ganjil genap. Menurut Wiwit, alasan penolakan karena ADO berpendapat ada kebebasan dan keleluasaan pengemudi menjalankan profesinya, mencari nafkah menghidupi keluarga.

Menyambung keprihatinan Deddy, sistem ganjil genap ini semacam kebijakan untuk meredakan asap, sementara sumber api masih jauh dari dibenahi.

Saat ini, kawasan permukiman dan industri menyebar tak terarah meluas ke seluruh Jabodetabek. Belum seluruh kawasan terbangun itu dilengkapi fasilitas publik, seperti jalan reguler dan jaringan transportasi publik, mulai dari angkutan pemukiman hingga angkutan massal.

Tidak heran kini jumlah pengguna angkutan publik justru menurun dan pengguna kendaraan pribadi meningkat. Sepeda motor, misalnya, menjadi pilihan utama karena mampu melewati jalan-jalan kecil, bahkan yang bukan jalan resmi.

Direktur Interim Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Faela Sufa mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya masih sangat mungkin menata ruang Jakarta dengan pola terpusat, artinya mengembangkan hunian dan transportasi terintegrasi di pusat kota. Hal ini karena masih banyak kawasan dan perkampungan di pusat kota Jakarta, juga di kota sekitar Ibu Kota, yang kepadatannya rendah karena masih didominasi bangunan satu lantai.

"Kawasan-kawasan ini bisa diubah menjadi hunian rumah susun sehingga bisa menampung lebih banyak orang dan transportasi yang terjangkau di dalam kota," katanya.

(WAD/TRE/DEA/BOW)

Judul	<b>Program Rumah Komunitas Jadi Solusi</b>	Tanggal	Jum'at, 9 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Melalui Program Sejuta Rumah (PSR), Kementerian PUPR sudah berhasil menyusutkan defisit hunian. Guna mendongkrak pasokan perumahan, kementerian tersebut bakal fokus pada perumahan berbasis komunitas.		

## ► DEFISIT HUNIAN

# Program Rumah Komunitas Jadi Solusi

Bisnis, JAKARTA — Melalui Program Sejuta Rumah (PSR), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah berhasil menyusutkan defisit hunian. Guna mendongkrak pasokan perumahan, kementerian tersebut bakal fokus pada perumahan berbasis komunitas.

Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, mengklaim bahwa selama 5 tahun berjalan, PSR berhasil menyusutkan *backlog* dari angka 11,4 juta pada 2015 menjadi 7,6 juta pada tahun ini.

"Kami sudah bisa menekan sekitar 3 jutaan unit selama pelaksanaannya. Artinya untuk 5 tahun ke depan lagi ini cukup efektif dan harus digencarkan lagi supaya bisa semakin menekan angka *backlog* itu," katanya, Rabu (7/8).

Guna meningkatkan pasokan hunian dalam 5 tahun ke depan, pemerintah menggulirkan program pembangunan perumahan komunitas atau P2BK. Pembangunan tersebut dinilai dapat menggerakkan potensi besar kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

dalam penyediaan perumahan secara swadaya.

"Jadi dengan program ini kami dorong masyarakat yang ingin membangun rumah, baik secara swadaya maupun dengan stimulan. Kami ada program bantuan stimulan rumah swadaya, misalnya dengan pola ABCG [akademisi, bisnis, *community*, dan *government*] atau BCG seperti tukang cukur di Garut yang kami dorong ikut program rumah subsidi," paparnya.

Dalam pembiayaannya, perumahan berbasis komunitas bisa mendapatkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (KPR FLPP) yang dikelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) di Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

"Regulasinya masih disiapkan agar bisa dikembangkan lebih luas. Seperti sudah dibangun untuk komunitas tukang cukur, kami akan perluas seperti komunitas wartawan, tukang sampah, pekerja, guru honor yang semuanya dikoordinasikan bersama." (Mutiarra Nabila)

Judul	<b>Pantura Perlu Dibentuk Kawasan Industri Baru</b>	Tanggal	Jum'at, 9 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 9)		
Resume	Bank Indonesia mengusulkan dibentuknya sejumlah kawasan industri baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.		

► EKONOMI JATENG

## Pantura Perlu Dibentuk Kawasan Industri Baru

Bisnis, SEMARANG — Bank Indonesia mengusulkan dibentuknya sejumlah kawasan industri baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Kawasan jalur pantai utara (pantura) masih menjadi magnet bagi investor karena faktor kesiapan infrastruktur, terutama jalur transportasi dan logistik.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Soekowardojo mengatakan bahwa kawasan industri yang terintegrasi akan menarik investor menanamkan modal. Di wilayah pantura telah tersedia jaringan jalan tol dan akses yang dekat menuju pelabuhan.

Menurut Soeko, panggilan akrabnya, kawasan pantura bagian barat yang membentang dari Brebes hingga Semarang, serta kawasan Jateng bagian tengah yang terakses oleh jalan tol yakni Solo dan sekitarnya, memiliki kapasitas untuk mengembangkan

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berupa kawasan industri. Selain didukung oleh infrastruktur, kawasan ini juga memiliki daya dukung lingkungan serta sumber air yang

mencukupi untuk kebutuhan tersebut.

"Wilayah di Jawa Tengah yang potensial dibentuk kawasan industri baru terbentang dari jalur pantura bagian barat lalu turun ke Solo dan sekitarnya, mengikuti jalur tol," ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (8/8).

Adapun, wilayah pantura Jawa Tengah bagian timur yakni Demak, Kudus, Pati, hingga Rembang, dinilai perlu memetakan potensi ekonomi lain selain industri karena meskipun dari sisi infrastruktur cukup memadai, tetapi daya dukung lingkungan yakni sumber air yang terbatas dinilai kurang mampu mencukupi kebutuhan industri.

Posisi wilayah tersebut sebagai lumbung padi di Jateng juga menjadi pertimbangan lain agar tidak saling bertentangan dengan rencana pengembangan kawasan industri.

Di sisi lain, lanjut Soeko, kawasan Jateng bagian tengah dan selatan yang tidak terakses oleh jalan tol juga dinilai tidak perlu memaksakan diri untuk membuka kawasan industri. Selain faktor dukungan infrastruktur

yang belum cukup untuk mewadahi kebutuhan industri, potensi daerah tersebut juga dinilai lebih cocok untuk mengembangkan industri pariwisata.

"Tidak semua wilayah di Jateng harus didirikan kawasan industri. Kita lihat untung dan ruginya terlebih dahulu. Saya rasa Jateng bagian selatan seperti daerah Purwokerto, Magelang, Wonosobo lebih cocok untuk pengembangan wisatanya," ujarnya.

Agar dapat memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi, menurut Soeko, pengembangan kawasan industri di Jateng dapat diarahkan agar memperkuat industri yang telah tumbuh dan berkembang di wilayah ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, kontribusi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Jateng per kuartal II/2019 mencapai 34,11%. Industri pengolahan juga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 1,25%.

"Di Jateng, industri tekstil berkembang dengan baik sekali. Dengan

demikian, investasi baru yang masuk berikut dengan pengembangan kawasan industrinya bisa diarahkan agar menopang industri yang sudah ada karena ekosistemnya sudah terbentuk," katanya.

### INVESTASI RUSIA

Dalam perkembangan lain, BI mengapresiasi delegasi Jawa Tengah yang mencatatkan sepuluh perjanjian kerja sama investasi dan dagang dalam Indonesia-Rusia Business Forum di

Moscow, Rusia, pekan lalu. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan MoU antara pengusaha Jateng dan Rusia di Ritz Carlton Hotel Moscow, Kamis (1/8).

"Kemarin waktu pameran di Moscow saya rasa Jateng cukup berhasil dengan penandatanganan 10 perjanjian kerja sama," tuturnya. Untuk kerja sama

dagang, Rusia sepakat akan impor berbagai produk. Di antaranya produk kapsul jamu senilai US\$5 juta, produk karagenan dan jelly US\$55.000, serta produk mebel US\$1 juta. Rusia juga memesan produk gula merah organik senilai total US\$100.000 dan produk kerajinan bambu senilai US\$6.000.

Forum bisnis ini merupakan rangkaian Festival Indonesia Moscow yang digelar setiap tahun. Pameran produk dan kebudayaan ini menyedot 1.000 pengunjung dan pengusaha Rusia. (K28)

### PENGUMUMAN

Dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 38 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat dihadapan ACIK KURNAYATI, SH., MH., MKn, Notaris di Bangkalan, telah dibubarkan PT. GEMILANG PANDAWA LIMA berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo. Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan selaku Likuidator mengumumkan kepada khalayak umum, kreditor dan/atau debitor, agar dalam waktu 2(dua) bulan setelah Pengumuman ini menghubungi Likuidator dengan alamat di Dusun Kasak RT.05 RW.03 Desa Terungkilan Kec.Krian Kab.Sidoarjo, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan/atau utang piutang yang menyangkut dengan bekas Perseroan Terbatas tersebut.

Persolan-persolan dan/atau utang piutang yang tidak diajukan kepada Likuidator dianggap telah selesai dan tidak menjadi tanggungjawab Likuidator.

Demikian harap semua pihak menjadi maklum.

Likuidator

Judul	Kontrak Diteken Akhir Tahun	Tanggal	Jum'at, 9 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Pemerintah menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama dengan badan usaha pelaksana pemenang lelang proyek preservasi jalan nasional di lintas Sumatra pada Desember 2019. Proyek ini merupakan yang pertama ditawarkan kepada badan usaha dengan skema kerja sama.		

► PROYEK KPBU LINTAS SUMATRA

# Kontrak Diteken Akhir Tahun

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama dengan badan usaha pelaksana pemenang lelang proyek preservasi jalan nasional di lintas Sumatra pada Desember 2019. Proyek ini merupakan yang pertama ditawarkan kepada badan usaha dengan skema kerja sama.

Rivki Maulana  
rivki.maulana@bisnis.com

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Sugiyartanto mengatakan saat ini pihaknya sudah membuka permintaan penawaran atau *request for proposal* (RfP). Tahap ini dibuka setelah hampir satu tahun pengumuman prakualifikasi yang meluluskan enam peserta.

"Target kami Desember 2019 sudah kontrak sehingga konstruksinya bisa dimulai pada tahun depan," ujar Sugiyartanto kepada *Bisnis*,

► Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk proyek kerja sama pemeliharaan jalan dan jembatan, sedangkan pelibatan badan usaha dalam preservasi dilakukan dalam rangka diversifikasi sumber pendanaan.

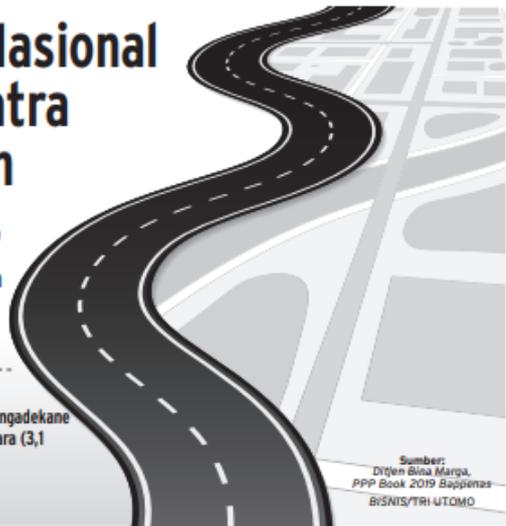
## Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatra di Sumatra Selatan

Biaya Investasi	Rp1,34 triliun	Skema pengembalian investasi
Financial internal rate of return (FIRR)	9,85%	Ketersediaan layanan (availability payment)
Durasi kerja sama	15 tahun	

### Lingkup preservasi jalan

Jalan Sriwijaya Raya (6,3 kilometer), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,2 kilometer), Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Prawiranegara (3,1 kilometer), Jalan Soekarno-Hatta (8,32 kilometer), Jalan Akses Terminal Alang-alang Lebar (4 kilometer), dan Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II (2,9 kilometer).

Sumber: Ditjen Bina Marga, PPP Book 2019 Suppinas-BISNIS/TRI UTOMO



Kamis (8/8).

Dia menerangkan, proyek preservasi jalan nasional ditawarkan sepanjang 30 kilometer di Sumatra Selatan. Proyek ini menelan biaya investasi sebesar Rp1,34 triliun. Investasi dari badan usaha akan dikembalikan lewat pola ketersediaan layanan atau *availability payment* (AP) selama masa kerja sama sepanjang 15 tahun. Pembayaran akan dicairkan bila badan usaha memenuhi standar layanan yang telah disepakati.

Dalam catatan *Bisnis*, enam peserta sudah dinyatakan lulus prakualifikasi sejak Agustus 2018. Keenam peserta itu yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan PT PP (Persero) Tbk. Selanjutnya konsorsium PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan PT Brantas Abipraya (Persero); PT Nusantara Infrastructure Tbk. dan PT Acset Indonusa Tbk.; dan konsorsium PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan Modem.

### JAMINAN RISIKO

Dalam proyek ini, PT Penjaminan

Infrastruktur Indonesia (Persero) akan memberikan penjaminan. Direktur Utama PII Armand Hermawan mengatakan penjaminan diberikan atas beberapa risiko antara lain risiko politik, risiko gagal bayar, dan risiko terminasi.

Menurut Armand, proyek ini sekaligus menjadi proyek jalan nontol pertama yang dijamin oleh PII. Sebelumnya, PII telah memberikan penjaminan pada sepuluh proyek jalan tol, tersebar di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Selain di Sumatra Selatan, Kementerian PUPR juga menyiapkan proyek kerja sama preservasi jalan nasional di Riau. Sugiyartanto menerangkan, proyek ini akan terpadu dengan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang.

UPPKB akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan. "Ini strukturnya beda. Kami tunggu pembebasan lahan dulu oleh Hubdar [Ditjen Perhubungan Darat]. Jadi jalannya oleh kami, jembatan timbangnya oleh Hubdar," jelasnya.

Berdasarkan informasi dari PPP

Book 2019 yang diterbitkan Bappenas, proyek preservasi jalan nasional di Riau membuka kesempatan bagi badan usaha untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan jalan sepanjang 43 kilometer. Lingkup pemeliharaan dimulai dari Simpang Kayu Ara (Kota Pekanbaru) hingga Simpang Lago (Kabupaten Pelalawan).

Secara umum, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk proyek kerja sama pemeliharaan jalan dan jembatan. Upaya pelibatan badan usaha dalam preservasi dilakukan dalam rangka diversifikasi sumber pendanaan.

Dalam periode 2015—2019, anggaran yang disetujui untuk preservasi jalan mencapai Rp235 triliun, lebih rendah dari pagu yang dibutuhkan sebanyak Rp278 triliun.

Dalam rencana strategis 2015—2019, Ditjen Bina Marga memproyeksi tingkat kemandapan jalan nasional sebesar 98% dari total panjang jalan 47.017 kilometer. Namun, memasuki 2019, realisasi target diperkirakan hanya mencapai level 92%—93%. ■

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Jum'at, 9 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 3)		
Resume	Penyelenggara jalan tol secara bertahap berkewajiban meningkatkan layanan infrastruktur dan di lokasi tersebut telah diwujudkan dengan membangun penambahan simpang susun Balaraja serta pelebaran jalur kendaraan sepanjang 12,5 km dari Balaraja Barat sampai Cikande untuk kemudian dituntaskan hingga ke Cilegon.		

### ► PROYEK PENINGKATAN INFRASTRUKTUR



Antara/Asep Fathurahman

**Kepala Badan** Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit (*kedua kiri*) menyimak penjelasan Presdir PT Marga Mandala Sakti Krist Ade Sudyono (*kedua kanan*) saat meninjau proyek peningkatan infrastruktur Tol Tangerang-Merak di Tangerang, Banten, Kamis (8/8). Penyelenggara jalan tol secara bertahap berkewajiban meningkatkan layanan infrastruktur dan di lokasi tersebut telah diwujudkan dengan membangun penambahan simpang susun Balaraja serta pelebaran jalur kendaraan sepanjang 12,5 km dari Balaraja Barat sampai Cikande untuk kemudian dituntaskan hingga ke Cilegon.

Judul	<b>3 Bendungan Siap Diisi</b>	Tanggal	Jum'at, 9 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Sejumlah proyek bendungan sudah memasuki tahap penyelesaian akhir. Dalam waktu dekat ini, tiga bendungan akan masuk proses pengisian awal atau impounding.		

► PROYEK RESERVASI AIR

## 3 Bendungan Siap Diisi

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah proyek bendungan sudah memasuki tahap penyelesaian akhir. Dalam waktu dekat ini, tiga bendungan akan masuk proses pengisian awal atau *impounding*.

"Terdekat itu ada 3, Bendungan Sei Gong, Sinangheula sama Paselloreng. Saat ini semuanya sudah 90% sekian penyelesaiannya, bagus progresnya," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hari Suprayogi kepada *Bisnis*, baru-baru ini.

Bendungan Sei Gong, katanya, akan menambah tampungan air di Kepulauan Riau sebanyak 11,8 juta meter kubik. Bendungan ini juga bisa memasok kebutuhan air baku sebanyak 400 liter per detik. Air baku akan diolah di instalasi pengolahan air Batam.

"Indonesia kaya akan air, dengan curah hujan sekitar 2,8 triliun m<sup>3</sup> per tahun. Untuk Kepulauan Riau kira-kira sebesar 0,2% dari jumlah tersebut," ujarnya.

Yogi menambahkan, setelah Bendungan Sei Gong terisi penuh, pihaknya akan melakukan proses desalinasi atau menghilangkan kadar garam berlebih dalam air untuk mendapatkan kualitas air tawar yang baik. Kemudian, instalasi pengolahan air lengkap dengan pipa saluran air akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Batam.

Adapun Bendungan Paselloreng di Desa Arajang Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) memiliki luas genangan 169 hektare dengan kapasitas tampung 138 juta m<sup>3</sup> untuk mengairi 7.000 hektare sawah. Bendungan multifungsi ini juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk 4 kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar 305 liter/detik, konservasi sumber daya air, pengendalian banjir Sungai Gilireng (1.002 m<sup>3</sup>/detik), perikanan air tawar, pengembangan pariwisata, dan potensi listrik 2,5 MW.

Konstruksi Bendungan Paselloreng dikerjakan oleh KSO (Kerja Sama Operasi) PT Wijaya Karya dengan PT Bumi Karsa.

Sementara itu, Bendungan Sindangheula, katanya, memiliki sejumlah fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat Serang dan sekitarnya, di antaranya untuk irigasi lahan seluas 1.000 hektare, pengendalian banjir dengan kapasitas tampung 1,5 juta m<sup>3</sup>, sekaligus memasok air baku dengan kecepatan 0,8 m<sup>3</sup> per detik. *(Krisia Putri K)*

Judul	<b>Geliat Labuan Bajo Menarik Investasi (1)</b>	Tanggal	Jum'at, 9 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman Jendela A)		
Resume	Presiden Joko Widodo mencanangkan Labuan Bajo jadi ikon pariwisata dunia dengan mempromosikannya sebagai destinasi premium.		

# GELIAT LABUAN BAJO MENARIK INVESTASI (1)

Presiden Joko Widodo mencanangkan Labuan Bajo jadi ikon pariwisata dunia dengan mempromosikannya sebagai destinasi premium. Akselerasi investasi di bidang pariwisata merupakan kunci untuk mengantar Labuan Bajo ke pasar industri pariwisata internasional.

## SULTANI

**K**abar pembangunan destinasi wisata Labuan Bajo sangat mengembirakan. Ibu kota Kabupaten Manggarai Barat itu berpotensi mendunia seperti Bali karena pantai, laut, dan wisata Komodo yang eksotis. Dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai kawasan wisata premium, diharapkan turis dari sejumlah negara membawa devisa sehingga meningkatkan perputaran roda perekonomian daerah.

Pada investor yang menanamkan modal di Labuan Bajo juga dengan sendirinya membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk masyarakat lokal Manggarai Barat ataupun Nusa Tenggara Timur.

Pertumbuhan lapangan kerja baru berbasis pariwisata menjadi bukti bahwa bisnis itu di Labuan Bajo sangat prospektif. Selama lima tahun ini ada dua indikator yang mengindikasikan kemajuan industri pariwisata di Labuan Bajo. Pertama, tren pergeseran lapangan usaha dalam struktur pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Manggarai Barat. Kedua, investasi dalam bisnis pariwisata tumbuh signifikan.

Secara umum, karakter ekonomi masyarakat Manggarai Barat masih bersifat agraris. Sebagian besar masyarakat di ujung Barat Pulau Flores ini masih menjadikan bertani dan nelayan sebagai kegiatan utama. Berdasarkan data PDRB, sektor bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan masih dominan, dan mencapai proporsi lebih dari 40 persen.

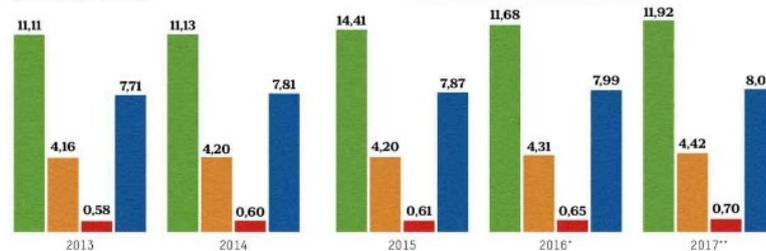
Namun, meski dominan, posisi sektor agraris mulai bergeser dan sensitif terhadap perubahan struktur ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari maraknya investasi di bidang pariwisata seiring gencarnya promosi Labuan Bajo sebagai ikon wisata setelah acara Sail Komodo 2013. Pada tahun itu, sumbangan sektor agraris terhadap PDRB masih 44,89 persen, atau hampir



## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Manggarai Barat

Distribusi PDRB tahunan dibagi dari lapangan usaha (persentase)

- Konstruksi
- Transportasi dan Perdagangan
- Penyediaan Akomodasi dan Makanan-Minuman
- Informasi dan Komunikasi



Total PDRB Pertahun (miliar rupiah)



Sumber: PDRB Nusa Tenggara Timur: Menukuri Kabupaten/Kota, 2013-2017 (BPS Nusa Tenggara Timur)

separuh dari semua lapangan usaha di daerah itu.

Tahun 2017, proporsi sektor agraris 42,12 persen, atau turun 2,77 persen selama empat tahun. Selama empat tahun itu (2013-2017), sektor-sektor ekonomi sekunder dan tersier di Manggarai Barat tumbuh positif meskipun persentasenya sangat kecil.

Sektor-sektor tersebut terkait langsung dengan maraknya bisnis pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya. Ada empat sektor yang terindikasi paling besar mengalami pertumbuhan sejak 2014, yaitu konstruksi; informasi dan komunikasi; transportasi dan pergudangan; serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Sektor konstruksi yang menyumbang distribusi pendapatan 11 persen tercatat mengalami pertumbuhan 0,81 persen selama 2013-2017. Indikasi dari pertumbuhan tersebut yaitu maraknya pembangunan hotel baru dan infrastruktur jalan di Labuan Bajo serta Manggarai Barat. Sektor berikutnya yaitu lapangan usaha informasi dan komunikasi yang mempunyai proporsi 7 persen PDRB Manggarai Barat. Selama empat tahun tersebut, sektor ini tumbuh hingga 0,34 persen.

Lapangan usaha yang ikut memanen pertumbuhan di balik maraknya bisnis pariwisata di Labuan Bajo yaitu transportasi dan pergudangan. Akumulasi pertumbuhan dari lapangan usaha penyediaan akomodasi juga tumbuh, 0,12 persen. Penyediaan akomodasi dalam struktur PDRB Kabupaten Manggarai Barat mempunyai proporsi paling kecil karena masih kurang dari 1 persen. Namun, tren pertumbuhan lapangan usaha ini sejak 2014 paling positif, terus meningkat

dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan keempat sektor atau lapangan usaha itu berada dalam skala kurang dari 1 persen dengan besaran bervariasi. Akumulasi sektor-sektor yang menunjang secara langsung perkembangan bisnis pariwisata di Labuan Bajo tercatat pertumbuhan 1,53 persen. Artinya, distribusi pendapatan sektor agraris yang berkurang itu, sebagian besarnya terindikasi terserap ke sektor yang terkait langsung dengan pariwisata.

#### Tren Investasi

Tak dimungkiri, era keemasan investasi di Labuan Bajo dan Manggarai Barat telah dimulai seiring dengan selesainya penyelenggaraan Sail Komodo 2013. Acara yang digelar sebulan lebih itu memang bertujuan mengeksplorasi keindahan alam di daratan dan lautan Labuan Bajo. Acara ini juga untuk mempromosikan produk kebudayaan Labuan Bajo dan Manggarai. Nama Komodo digunakan sebagai ikon dalam kegiatan ini untuk merangsang wisatawan sekaligus calon investor berkunjung ke Labuan Bajo.

Sail Komodo 2013 berdampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Kawasan wisata baru tumbuh, ditandai dengan didirikannya hotel-hotel bintang, restoran, kafe, dan fasilitas bagi turis asing di sepanjang pantai Labuan Bajo. Saat ini, hotel bintang tiga hingga empat bisa ditemukan di Labuan Bajo meskipun jumlahnya belum banyak.

Pantai Pede yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, dalam waktu relatif singkat berubah menjadi kawasan wisata baru di Manggarai Barat. Desa yang terletak di sebelah selatan Labuan Bajo itu

kini menjadi pusat hotel bintang di Manggarai Barat.

Promosi melalui Sail Komodo 2013 juga melambungkan "permata tersembunyi" Labuan Bajo selain sebagai salah satu destinasi wisata alam, yaitu keindahan alam bawah laut. Pamor perairan di sebelah utara Labuan Bajo melonjak drastis sehingga dalam waktu singkat muncul puluhan titik selam yang memikat para petualang bawah laut penggiat selam.

Berbagai bisnis baru muncul untuk melayani kepentingan wisatawan yang hendak menikmati keindahan laut, mulai dari pantai, air laut, hingga penyelaman. Warga setempat dan pendatang di kawasan sekitar Manggarai Barat mendulang rezeki. Mereka menawarkan kapal motor nelayan atau *speed boat* untuk transportasi, pemandu selam, rumah penginapan, dan suvenir.

Tak pelak, Labuan Bajo berkembang menjadi "kota modern" kecil dibandingkan dengan seluruh kota di Pulau Flores. Bahkan, dibandingkan akomodasi pariwisata di Kabupaten Ende (tempat wisata Gunung Kelimutu), kondisi di Labuan Bajo jauh lebih memadai. Ke depan, seiring perpanjangan landasan Bandara Komodo, jumlah kunjungan turis mancanegara akan lebih banyak.

#### Okupansi hotel

Para investor memanfaatkan animo wisatawan yang tinggi terhadap wisata bahari ini sebagai peluang untuk membuka sektor bisnis baru dan mandiri. Seiring dengan kunjungan wisatawan ke perairan Komodo, bisnis wisata bahari ini pun berkembang pesat. Bahkan, perkembangannya turut memberi andil bagi perubahan lanskap bisnis pariwisata di La-

buan Bajo.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Manggarai Barat Silvester Wanggal mengatakan, sebelum Sail Komodo digelar, diperkirakan hanya ada 30 hotel di Labuan Bajo. Tahun 2017, jumlahnya meningkat drastis. Ia memperkirakan sudah ada 60 hotel di Labuan Bajo, atau dua kali lipat dari sebelum Sail Komodo.

Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat, sampai 2017, sebanyak 62 hotel telah beroperasi secara resmi, sementara yang menunggu proses perizinan 34 hotel. Jumlah ini belum termasuk hotel yang masih dalam proses pembangunan, yang tersebar di seluruh Labuan Bajo, Pantai Pede, dan lokasi lain di Kecamatan Komodo.

Peningkatan jumlah hotel sekarang ini karena kunjungan wisatawan asing dan Nusantara terus meningkat setelah Sail Komodo. Dulu, wisatawan datang hanya untuk melihat komodo. Sekarang, mereka tak hanya melihat komodo, tetapi juga *diving*, *snorkeling*, atau berjemur di pantai," kata Wanggal, beberapa waktu yang lalu.

Setelah Sail Komodo berhasil mengeksplorasi keindahan bawah laut di perairan Pulau Komodo dan sekitarnya, bisnis wisata air langsung melonjak. Tercatat, hingga 2017, ada 33 unit bisnis wisata air beroperasi di Labuan Bajo. Adapun yang masih menunggu proses perizinan sebanyak 13 unit usaha. Dulu, wisata bahari ini masih menjadi paket yang ditawarkan pihak hotel sehingga pengelolaan kegiatan dan destinasinya berada di bawah manajemen hotel. (Bersambung)

(LITBANG KOMPAS)

Judul	<b>Sanitasi Penunjang Wisata Belum Diperhatikan</b>	Tanggal	Jum'at, 9 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 17)		
Resume	Pembangunan sanitasi penunjang pariwisata belum menjadi perhatian kepala daerah. Padahal, sanitasi berperan penting dalam promosi kawasan wisata sekaligus menjamin kesehatan wisatawan dan masyarakat.		

## PARIWISATA

# Sanitasi Penunjang Wisata Belum Diperhatikan

**MALANG, KOMPAS** – Pembangunan sanitasi penunjang pariwisata belum menjadi perhatian kepala daerah. Padahal, sanitasi berperan penting dalam promosi kawasan wisata sekaligus menjamin kesehatan wisatawan dan masyarakat.

"Rendahnya komitmen kepala daerah bisa dilihat dari minimnya alokasi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pembangunan sanitasi. Kami mengimbau kepala daerah berkomitmen terhadap sanitasi. Bukan sekadar membangun rumah sakit, puskesmas, melainkan juga menjamin promosi kesehatan berjalan maksimal," ucap Ketua Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) Syarif Fasha pada Forum Advocacy Horizontal Learning (AHL) 2019 Akkopsi di Malang, Jawa Timur, Kamis (8/8/2019).

Dalam acara itu hadir antara lain Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional II Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Reza Pahlevi, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Kohar Hari Santoso, dan Pelaksana Tugas Bupati Malang M Sanusi. Selain itu, ada sejumlah kepala daerah, seperti Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Bupati Pringsewu Sujadi, serta puluhan perwakilan kepala daerah yang menjadi anggota Akkopsi.

AHL 2019 fokus pada kolaborasi sanitasi dan pariwisata. Oleh karena itu, dilakukan kunjungan ke Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Desa Pujon dinilai berhasil mengkolaborasi potensi daerah dan sanitasi untuk menunjang wisata dan ekonomi masyarakat.

Menurut Syarif yang juga Wali Kota Jambi, pengelolaan wisata di banyak daerah di Indonesia kurang memberi perhatian pada sanitasi. Sementara di luar negeri sanitasi menjadi perhatian utama. "Karena itu, kami kolaborasi perhatian pada pariwisata dengan sanitasi. Wisata tidak akan sukses tanpa sanitasi," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Syarif berharap Kemenpar mendukung kabupaten dan kota yang kepala daerahnya memiliki komitmen kuat mengembangkan sanitasi. Pemerintah pusat tidak bisa membangun tanpa dukungan kabupaten dan kota. Di Jambi, menurut Syarif, sanitasi berjalan baik karena melibatkan banyak pihak.

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional II Kemenpar Reza Pahlevi mengatakan, salah satu syarat destinasi wisata yang baik adalah memiliki amenitas, yaitu fasilitas di luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan wisatawan di suatu destinasi. Dalam hal ini toilet dan sanitasi ideal. Kemenpar, kata Reza, berkomitmen mendorong destinasi wisata agar memiliki sanitasi yang baik, selain akses transportasi dan akomodasi. (WER)

Judul	<b>Transaksi Tol Tanpa Berhenti Diterapkan Mulai 2020</b>	Tanggal	Jum'at, 9 Agustus 2019
Media	Koran Tempo (Halaman 6)		
Resume	Kepala BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit, mengatakan skema single lane free flow alias transaksi tanpa berhenti diterapkan secara penuh di gerbang tol pada 2020.		

## Transaksi Tol tanpa Berhenti Diterapkan Mulai 2020

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danang Parikesit, mengatakan skema single lane free flow (SLFF) alias transaksi tanpa berhenti diterapkan secara penuh di gerbang tol pada 2020

EDISI, 9 AGUSTUS 2019



Simulasi Single Lane Free Flow (SLFF) di Kantor Operasional Clujung, Tangerang, 18 Maret lalu. pu.go.id

**JAKARTA** - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danang Parikesit, mengatakan skema single lane free flow (SLFF) alias transaksi tanpa berhenti diterapkan secara penuh di gerbang tol pada 2020. "Nanti akan dipilih teknologi yang paling baik untuk diterapkan," kata Danang saat menguji SLFF di jalan tol Tangerang-Merak, kemarin.

Sistem SLFF mulai diuji coba di sejumlah pintu tol sejak akhir Februari lalu. Dalam pengujian, BPJT memakai teknologi Dedicated Short Range Communication (DSRC) yang memungkinkan operator pintu tol menangkap data identitas kendaraan lewat alat khusus yang terpasang di mobil atau on-board unit. Alat pembaca data bisa mengklasifikasi kendaraan yang melintas sehingga tarif yang dibayarkan lebih akurat sesuai dengan jenis kendaraan dan jarak tempuhnya.

Menurut Danang, penerapan SLFF sempat dicoba di empat gerbang tol Tangerang-Merak, yakni Cikupa, Cikande, Serang Barat, dan Serang Timur. "Akan kami perluas," ujarnya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan memperkirakan skema ini mampu mengurangi lamanya waktu layanan pintu tol. Dengan begitu, volume layanan bisa didongkrak menjadi rata-rata 2.500 kendaraan per jam, jauh dari rasio layanan pintu tol manual tunai.

Pemerintah juga sempat mencari opsi teknologi pesaing DSRC, yakni Radio Frequency Identification (RFID), yang mengharuskan pengguna jalan memiliki stiker perekam data. Merujuk riset Kementerian Perhubungan, biaya pemakaian RFID di salah satu negara pengguna, seperti Singapura, berkisar US\$ 2 per kendaraan. Sedangkan biaya DSRC sebesar US\$ 15-30 per kendaraan.

### BERITA TERKAIT

[Yingluck Berstatus Warga Serbia](#)

[Irak Kembalikan Jasad Warga Kuwait](#)

[Putri Nawaz Sharif Ditangkap Terkait Korupsi](#)